

**ANALISIS PENGARUH KOMPETISI POLITIK, TINGKAT
PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN INFORMASI NON KEUANGAN DALAM WEBSITE
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Padang**



Oleh :

YELVINA ANDRIANI
2009/98619

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

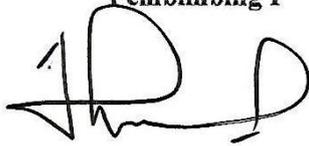
**ANALISIS PENGARUH KOMPETISI POLITIK, TINGKAT
PENDIDIKAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN INFORMASI NON KEUANGAN DALAM WEBSITE
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA**

Nama : Yelvina Andriani
BP/NIM : 2009 / 98619
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

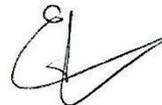
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak,
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

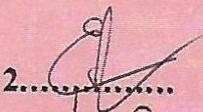
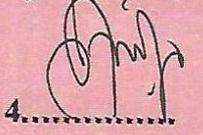
*Dinyatakan Lulus Setelah di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS PENGARUH KOMPETISI POLITIK, TINGKAT
PENDIDIKAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN INFORMASI NON KEUANGAN DALAM WEBSITE
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA**

Nama : Yelvina Andriani
BP/NIM : 2009 / 98619
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 10 Februari 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	 1.....
2. Sekretaris	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	 2.....
3. Anggota	: Halmawati, SE, M.Si	 3.....
4. Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc,Ak	 4.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yelvina Andriani**
NIM/Tahun Masuk : 98619/2009
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 1 November 1991
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp. Taruko I Blok D/8 Kelurahan Korong
Gadang, Kecamatan Kuranji, Padang
No. Hp/Telepon : 081267444991
Judul Skripsi : “Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun program perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari 2015
Yang menyatakan



Yelvina Andriani
98619/2009

ABSTRAK

Yelvina Andriani (98619/2009) : Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda Kabupaten dan Kota di Sumatera, Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2014.

**Pembimbing : 1. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
2. Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam website Pemda.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh website kabupaten/kota di Sumatera. Sampel pada penelitian ini berjumlah 111 website Pemda. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut waktu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam *cross section*. Data *cross section* adalah data yang berasal dari satu tahun tetapi terdiri dari banyak sampel. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Kompetisi Politik berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam website Pemda, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,116 > 1,9816$ ($sig\ 0,037 < \alpha\ 0,05$) yang berarti H_1 diterima. 2) Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam website Pemda, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,452 > 1,9816$ $sig\ (0,016 < 0,05)$ yang berarti H_2 diterima. 3) Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam website Pemda, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,012 < 1,9816$ $sig\ (0,314 > 0,05)$ yang berarti H_3 ditolak.

Dalam penelitian ini disarankan: (1) Pemerintah perlu membuat perlu standarisasi pengungkapan non-keuangan yang sama untuk setiap daerah di tingkat nasional, agar masyarakat dimanapun tempatnya mampu mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerahnya dengan baik. (2) Bagi Penelitian selanjutnya peneliti menyarankan periode pengamatan website yang lebih panjang dan bisa dilakukan lebih dari 2 kali di kesempatan yang berbeda untuk menghindari masalah aksesibilitas website.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak** selaku Pembimbing I dan Ibu **Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak** selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu tim penguji dan penelaah.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

5. Pimpinan dan seluruh Karyawan/Karyawati BPS yang telah membantu memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Abang, Kakak beserta Adik-adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Dithi Amanda Putri, Wulan Oukta Laurenza, Yolanda Amelina, sahabat terbaik yang ada dikala susah senang, tempat berbagi, bercanda, berkeluh kesah selama ini.
9. Novia Reski, Teman seangkatan, seperjuangan, senasib dan sepenanggungan, susah senang kita lewati bersama selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, dan akhirnya gelar Sarjana Ekonomi itu kita raih teman.
10. Teman-teman mahasiswa angkatan 2009 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.

11. David Darmadi, terimakasih selalu ada dalam keadaan apapun. Kesabaran dalam menghadapi ego yang kadang tidak terkontrol, terimakasih juga telah mengajarkan ilmu ikhlas meskipun banyak terjadi penolakan dihati, semoga semua berakhir indah seperti yang kita harapkan, Amin ya Rabb

12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Janurari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Teori Agensi	11
2. Teori Signaling	13
3. Pengungkapan	13
a. Pengertian Pengungkapan	13
b. Tingkat Pengungkapan	14
c. Pengungkapan Informasi kepada publik	15
4. Informasi	16
5. Kompetisi Politik	19
6. Tingkat Pendidikan	20
7. Jumlah Penduduk	21
B. Penelitian Relevan	21
C. Pengembangan Hipotesis	23
D. Kerangka Konseptual	26
E. Hipotesis	27

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Populasi dan Sampel	28
C. Jenis Data dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Defenisi Variabel dan Pengukurannya.....	30
F. Uji Asumsi Klasik	36
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Defenisi Operasional.....	40

BAB IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Deskripsi Variabel Penelitian	42
C. Analisis Konten	56
a. Kesimpulan.....	61
b. Implikasi.....	62
D. Analisis Data	63
a. Statistik Deskriptif	63
b. Uji Asumsi Klasik	64
c. Analisis Regresi Berganda	68
d. Uji Kelayakan Model	70
e. Uji Hipotesis	71
E. Pembahasan	73

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	82
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Website Pemda di Sumatera yang jadi sampel	29
2. Pengungkapan terkait informasi menurut Martani (2013)	31
3. Pengungkapan terkait Berita menurut Martani (2013)	32
4. Pengungkapan terkait Link Website Dinas menurut Martani (2013) ..	34
5. Ikhtisar Pengukuran Variabel Penelitian	35
6. Pengambilan Keputusan Autokolerasi	37
7. Data Skor Checklist Website Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera.....	43
8. Data Rasio Partai Politik Pendukung Kepala Daerah di Sumatera	46
9. Data Rata-rata Lama Sekolah Masyarakat di Sumatera.....	50
10. Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera	53
11. Website dengan Skor Checklist Tertinggi.....	56
12. Website dengan Skor Checklist Terendah.....	57
13. Ringkasan Pengungkapan Terkait Informasi	57
14. Ringkasan Pengungkapan Terkait Berita.....	59
15. Ringkasan Pengungkapan Terkait Ketersediaan Link Website Dinas...	61
16. Statistik Deskriptif	64
17. Uji Normalitas.....	65
18. Uji Multikolinearitas.....	66
19. Uji Heterokedastisitas	67
20. Uji Autokolerasi.	68
21. Koefisien Regresi Berganda	68
22. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
23. Uji F Hitung	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabulasi Sampel	82
2. Tabulasi Data Penelitian	85
3. Analisis Deskriptif	88
4. Uji Asumsi Klasik	88
5. Koefisien Regresi Berganda	90
6. Uji Kelayakan Model	91
7. Uji F dan Uji T	91

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak diberlakukannya UU no.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan diberikannya wewenang yang lebih luas kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia, maka pengelolaan Pemerintah Daerah menjadi semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Seperti kata pepatah “*with great power comes great responsibility*” bertambahnya wewenang memunculkan tanggung jawab tambahan. Masyarakat sebagai *stakeholder* terpenting pemerintah daerahnya dan sejauh mana pemerintah daerah yang mereka pilih benar-benar melaksanakan tugas dan amanat yang telah diberikan kepada mereka secara bertanggungjawab. Di sisi lain calon investor, wisatawan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya juga memerlukan informasi tentang daerah dan pengelolaannya untuk mengambil keputusan. Seluruh pihak-pihak yang berkepentingan ini, dalam konteks *stakeholder theory* memerlukan informasi yang berbeda, sehingga Pemerintah Daerah, seiring dengan bertambahnya *stakeholder* diharapkan mampu memberikan semakin banyak informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak sebagai bentuk akuntabilitasnya (Roberts, 1992).

Website Pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan Pemerintah Daerah kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet (Laswad et. Al 2005).

Dalam Martani Nastiti (2013) di Indonesia perkembangan penggunaan website oleh Pemda di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia yang diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Hampir semua Pemda di Indonesia memiliki website, dengan kualitas website dan peranan yang berbeda. Ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang daerah tersebut, namun ada juga yang telah memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan dan sarana berkomunikasi secara interaktif dengan warganya. Website disetiap pemerintahan daerah kabupaten atau kota dapat membantu terbentuknya pemerintahan yang bersifat *Good governance* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Manfaat yang didapat dari website disetiap kabupaten dan kota adalah adanya semangat keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat, ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan (transparansi) sehingga hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Sedangkan informasi berupa data potensi daerah, statistik dan peluang usaha disajikan untuk kalangan bisnis maupun investor, sebagai upaya daerah meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah).

Salah satu upaya dilakukan pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan informatika pada tahun 2003 yaitu mengeluarkan panduan isi pembangunan situs website pemda. Tapi sayangnya pembuatan panduan tersebut dibuat dengan cara menganalisis 90 situs Pemerintah daerah, dimana kondisi pembangunan website pemda yang hingga saat ini masih terkesan asal jadi saja, semestinya pemerintah dalam membuat standarisasi situs web pemda didasarkan pada UU

yang berlaku. Agar terciptanya informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka semestinya isi web pemda yang ada mengacu pada sistem perundang-undangan yang ada. Adapun item standar situs web Pemda versi Depkominfo adalah Selayang pandang, pemerintah daerah, geografi, peta wilayah dan sumber daya, peraturan dan kebijakan daerah, serta buku tamu.

Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi warga negara yang wajib dilindungi Undang-undang dan badan publik wajib menerapkan sistem informasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi publik secara akurat baik melalui media elektronik dan non-elektronik. Undang-undang ini mendorong badan publik termasuk pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi yang wajar diketahui publik. Pengungkapan informasi kepada publik ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas publik yang secara esensial berarti kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi tugas.

Dalam rangka menjalankan akuntabilitas publik dibutuhkan sebuah transparansi yakni tingkat dimana warga negara, media dan pasar modal dapat mendapatkan informasi mengenai strategi, aktivitas dan hasil dari aktivitas tersebut. Dalam pengertian yang lebih ringkas, Piotrowski & Bertellidalam Martani (2013) berpendapat transparansi adalah adanya akses terhadap informasi Pemerintah daerah oleh masyarakat. Akses terhadap informasi ini dapat dilakukan melalui media apapun, namun untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, pengungkapan atau transparansi pemerintah daerah diidentifikasi sebagai keberadaan informasi tersebut dalam website resmi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Menurut Suwardjono, secara umum tujuan dari pengungkapan (disclosure) adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pengungkapan dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan dari pengguna. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawasan berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Informasi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam organisasi, tanpa informasi kegiatan operasionalnya tidak akan berjalan dengan baik. Menurut Bodnar George dan William (2000:5) mendefinisikan informasi sebagai data yang berguna yang diolah sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan Gordan (1974) dalam Jogiyanto (2000:25) informasi merupakan data yang telah diolah kedalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami dalam keputusan sekarang atau masa depan. Dari pengertian di atas tentang informasi, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diproses dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan.

Dalam Martani Nastiti (2013) beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai memanfaatkan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya adalah PP No.6 Tahun 2008, PP No.3 Tahun 2007, dan Permendagri No.7A Tahun 2007. Media elektronik pada ketiga peraturan yang dimaksud dapat merujuk kepada *website* milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan Pemda melalui media elektronik adalah: informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No.6 Tahun 2008). Merujuk pada tiga peraturan tersebut, pengungkapan informasi selain informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digolongkan sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela.

Laswad et.al. (2005) meneliti *internet financial reporting* Pemda New Zealand. Penelitian berfokus kepada faktor-faktor yang dianggap paling relevan mempengaruhi hasil dari *internet financial reporting* Pemda New Zealand. Faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan adalah: (1) Kompetisi politik, (2) *Size*, (3) *Leverage*, (4) Kekayaan Pemda, (5) *Press visibility*, (6) Tipe Pemda. Hasil penelitian Laswad et.al. (2005) menunjukkan bahwa *size* dan tingkat kompetisi politik bukan merupakan faktor yang memiliki asosiasi dengan tingkat *internet financial reporting*. Pemda yang memiliki tingkat *leverage* dan tingkat kekayaan yang lebih tinggi memiliki tingkat *internet financial reporting* yang lebih tinggi.

Menurut Bardhan dan Yang dalam Nairobi (2014) kompetisi politik adalah kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan mengendalikan pemerintahan dan

mengalokasikan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan politik dan kepentingan masyarakat. Menurut Downs dalam Nairobi (2014), kompetisi politik diartikan sebagai kompetisi antara kandidat untuk mendapatkan suara terbanyak dari pemilih untuk menjalankan suatu platform kebijakan yang layak dijalankan.

Tingkat pengungkapan informasi lainnya juga dapat diukur dari tingkat pendidikan dan jumlah penduduk. Menurut Soekanto (2002) tingkat pendidikan seseorang akan membantu orang tersebut untuk lebih mudah menangkap dan memahami suatu informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka tingkat pemahaman juga meningkat serta tepat dalam pengambilan sikap. Menurut Said (1995) penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Setiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Jumlah penduduk berbeda memiliki permintaan informasi yang berbeda. Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu stakeholder terpenting Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar.

Dalam pengungkapan informasi kepada publik, kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada pengungkapan informasi finansial (*fiscal transparency*), misalnya yang telah dilakukan oleh Laswad et.al. (2005). Dalam penelitian tersebut tingkat pengungkapan informasi keuangan diukur dalam bentuk pengungkapan secara menyeluruh informasi tentang anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal ini hubungan antara masyarakat dan pemerintah digambarkan seperti hubungan *principal* dan *agent* dalam *agency*

theory, dimana pengungkapan informasi keuangan oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya daerahnya.

Meskipun pengungkapan informasi keuangan adalah hal yang sangat penting, informasi lain tentang pengelolaan daerah juga menjadi sangat penting. Di Indonesia, Sulistiyo, et.al (2008) meneliti informasi apa saja yang telah disajikan Pemda dan menemukan banyak informasi yang diperlukan oleh *stakeholder* belum disajikan dalam website Pemda. Website Pemda di Indonesia (dengan sampel 90 website) sebagian besar hanya menyajikan informasi yang diwajibkan oleh Kemkominfo yakni: Selayang Pandang, Pemda, Geografi, Peta Wilayah dan Sumber Daya, Perda dan Buku Tamu. Informasi lainnya terkait data statistik belum diungkapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Sutaryo (2013) mengenai *Determinant Internet Financial Local Reporting in Indonesia* penelitiannya adalah kompetisi politik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, *size* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Wicaksono (2013) mengenai Pengungkapan Informasi Non-keuangan tentang Pelayanan Publik melalui Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, hasil penelitiannya adalah ukuran dari Pemda memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Pemda dalam website. Artinya, Pemda dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemda dengan jumlah penduduk lebih sedikit. Penelitian tersebut hanya berfokus pada informasi yang bersifat non-keuangan yang selama ini belum banyak

dilakukan peneliti terdahulu dengan mengelaborasi hubungan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dalam Website Pemda.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada website pemda kabupaten dan kota di Sumatera belum semuanya mengeluarkan informasi non keuangan dengan baik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kemkominfo. Pengungkapan informasi non keuangan tidak dikelola dengan baik, sehingga fenomena ini membuat peneliti tertarik meneliti tentang tingkat pengungkapan informasi non keuangan.

Berpijak dari penelitian pengungkapan informasi non keuangan terdahulu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh kompetisi politik, tingkat pendidikan dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam website pemda. Oleh karenanya, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda Kabupaten dan Kota di Sumatera”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Tingkat

Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda ?

2. Bagaimanakah Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda ?
3. Bagaimanakah Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris tentang:

1. Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda
2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda
3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak Akademisi dapat memberikan kontribusi dalam menambah literature mengenai faktor kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dalam website Pemda.

2. Bagi Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website Pemda.

3. Bagi Riset selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

Antara Pemerintah daerah dengan masyarakat saling berhubungan. Masyarakat memberikan amanat kepada Pemda untuk menjalankan pemerintahan, selanjutnya Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat. Dalam hubungan ini teori agensi merupakan gambaran antara pemda dengan masyarakat. Teori agensi adalah hubungan antara principal dan agent. Dalam hal ini selaku agent adalah pemerintah daerah, sedangkan principal adalah masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

1. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara manajer (agen) dengan pemilik, kreditor dan pihak lain (prinsipal). Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen (Jensen and Meckling., 1976). Inti dari hubungan keagenan adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan. Prinsipal akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan pemerintahan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan return dari uang yang mereka investasikan atas pengelolaan pemerintahan. Menurut Lestari (2007) dalam Alfaiz (2013) terdapat tiga macam hubungan dalam kerangka teori keagenan, yaitu hubungan antara manajer dengan pemilik (bonus plan hypothesis), hubungan antara manajer dengan kreditor (debt/equity hypothesis), dan hubungan manajer dengan pemerintah (political cost hypothesis). Adanya

dorongan bagi pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela didasarkan pada teori keagenan, yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetris informasi.

Dalam teori agensi, diasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Konflik akan terus meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari, yaitu untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal.

Teori keagenan menggunakan insentif pemerintah untuk menjelaskan pengungkapan sukarela. Watson *et al.* (2002) mengemukakan bahwa pemerintah memiliki insentif untuk meningkatkan pengungkapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka bertindak secara optimal karena mereka tahu bahwa masyarakat berusaha untuk mengendalikan perilaku mereka melalui kegiatan pemantauan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan meningkatkan pengungkapan (Aly *et al.*, 2010). Sebagai wujud dari akuntabilitas agen kepada prinsipal, setiap periode agen memberikan laporan mengenai informasi pemerintahan kepada prinsipal. Informasi yang diungkapkan dalam penelitian ini yaitu melalui *website* pemda. Agen diharapkan dapat mengungkapkan informasi secara luas, sehingga bisa mengurangi konflik yang ada, ketika prinsipal merasa bahwa agen telah bekerja sesuai keinginan mereka.

2. Signaling Theory

Menurut Jama'an (2008) *signaling theory* adalah bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Begitu dengan informasi non keuangan dalam website pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pemberi sinyal, menyediakan akses informasi kepada masyarakat.

Menurut Wolk, et al. (2001) teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal sinyal pada pengguna laporan keuangan.

3. Pengungkapan

a. Pengertian pengungkapan

Pengungkapan (*disclosure*) berhubungan dengan cara penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama. Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi harus digabung dengan pos laporan yang lain, apakah suatu pos perlu dirinci, atau apakah suatu informasi cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki (*footnote*). Termasuk dalam pengertian

pengungkapan ini adalah masalah penentuan masuk tidaknya informasi yang bersifat kualitatif ke dalam seperangkat laporan keuangan. Standar akuntansi mengatur cara-cara pengungkapan informasi tersebut. Salah satu contoh penyajian yang diatur dalam SAP misalnya saja bahwa utang disajikan di laporan keuangan dengan cara mengurutkan atas dasar jangka waktu pelunasan, yaitu yang paling pendek diletakkan paling atas.

b. Tingkat Pengungkapan

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengklasifikasikan tiga tingkat dari pengungkapan sebagai berikut.

- a) Pengungkapan memadai (adequate disclosure) adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah .
- b) Pengungkapan wajar (fair or ethical disclosure) adalah tingkat yang harus dicapai agar pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya.
- c) Tingkat penuh (full disclosure) menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang terpaut dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini pihak yang berwenang dalam menetapkan peraturan adalah Badan Pengawas Pasar Modal

(Bapepam). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan.

Menurut Suwardjono, secara umum tujuan dari pengungkapan (disclosure) adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pasar modal merupakan sarana utama untuk pemenuhan dana dari masyarakat, karenanya pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informatif, dan melayani kebutuhan khusus.

Pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka. Pengungkapan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan dari pengguna. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawasan berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

c. Pengungkapan Informasi Kepada Publik

Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi warga negara yang wajib dilindungi Undang-undang dan badan publik wajib menerapkan sistem informasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi

publik secara akurat baik melalui media elektronik dan non-elektronik. Adapun informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik terkait, laporan keuangan, informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan, badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Undang-undang ini mendorong badan publik termasuk pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi yang wajar diketahui publik. Pengungkapan informasi kepada publik ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas publik yang secara esensial berarti kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi tugas.

Dalam rangka menjalankan akuntabilitas publik ini lah kemudian dibutuhkan adanya transparansi yakni tingkat dimana warga negara, media dan pasar modal dapat mendapatkan informasi mengenai strategi, aktivitas dan hasil dari aktivitas tersebut. Dalam pengertian yang lebih ringkas, Piotrowski & Bertelli dalam Martani (2013) berpendapat transparansi adalah adanya akses terhadap informasi Pemerintah daerah oleh masyarakat. Akses terhadap informasi ini dapat dilakukan melalui media apapun, namun untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, pengungkapan atau transparansi pemerintah daerah diidentifikasi sebagai keberadaan informasi tersebut dalam website resmi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera.

4. Informasi

a. Pengertian informasi

Informasi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam organisasi, tanpa informasi kegiatan operasionalnya tidak akan berjalan dengan baik. Menurut

Bodnar George dan William (2000:5) mendefenisikan informasi sebagai data yang berguna yang diolah sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan Gordan (1974) dalam Jogiyanto (2000:25) informasi merupakan data yang telah diolah kedalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami dalam keputusan sekarang atau masa depan. Dari pengertian di atas tentang informasi, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diproses dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan.

Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

E-government adalah bentuk aplikasi dari teknologi informasi, terutama teknologi internet untuk memperkaya akses, penyampaian informasi dan pelayanan Pemerintah untuk masyarakat, unit bisnis, pegawai, dan *stakeholder* lainnya. Implementasi *e-government* terus mengalami peningkatan, terdapat 19% dari seluruh organisasi Pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi *e-government* (West,2005).

Gupta et.al. dalam Puspita Martani (2012), berdasarkan interaksi yang dilakukan Pemerintah dengan *stakeholdersnya*, e-government diklasifikasikan sebagai interaksi antara Pemerintah dengan: (1) Klien internal dan penduduknya "Government to Citizen (G2C)"; (2) Unit bisnis terkait "Government to Business (G2B)"; (3) Pegawai internal Pemerintah "Government to Employee (G2E)"; (4) Institusi Pemerintah lainnya "Government (G2G)"; (5) hubungan antara penduduk dengan penduduk, "Citizen to Citizen (C2C)".

Konten website berisi mengenai informasi apa saja yang dapat diungkapkan entitas pelaporan pada website yang digunakannya Perez et.al. (2005) mencoba merumuskan konten dari informasi yang dimasukkan ke dalam website. Terdapat tiga tipe konten informasi yang dapat disediakan Pemerintah di websitenya, yaitu (1) Informasi anggaran dan arus kas. (2) Informasi keuangan. (3) Indikasi manajemen dan pelayanan yang diberikan. Presentasi website merepresentasikan desain, navigasi, fitur, dan tools yang ada pada website milik entitas ekonomi pada website miliknya sehingga website menjadi lebih menarik atau lebih mudah diakses oleh *users*.

Perez Hernandez dalam Puspita Martani (2012) mendefinisikan desain dan navigasi dari website mencakup enam hal penting yang memberikan dampak terhadap akses dari website Pemerintah, yaitu: (1) Informasi yang mudah untuk dikenali. (2) Personalization dari informasi yang disajikan kepada users. (3) Kemudahan transfer informasi. (4) Kemudahan manajemen informasi yang disediakan. (5) Penggunaan bahasa yang berbeda untuk mengungkapkan informasi. (6) Kemudahan interaksi dengan *users*.

Laswad et.al. (2005) meneliti *internet financial reporting* Pemda New Zealand. Penelitian berfokus kepada faktor-faktor yang dianggap paling relevan mempengaruhi hasil dari internet financial reporting Pemda New Zealand. Faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan adalah: (1) Kompetisi politik. (2) Size, (3) Leverage, (4) Kekayaan Pemda, (5) Press visibility. (6) Tipe Pemda. Hasil penelitian Laswad et.al (2005) menunjukkan bahwa size dan tingkat kompetisi politik bukan merupakan faktor yang memiliki asosiasi dengan tingkat internet financial reporting. Pemda yang memiliki tingkat leverage dan tingkat kekayaan yang lebih tinggi memiliki tingkat internet financial reporting yang lebih tinggi.

5. Kompetisi Politik

Corry dalam Haryanto (1948) menyatakan bahwa partai politik merupakan suatu perkumpulan yang bermaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan menempatkan para anggotanya pada jabatan-jabatan pemerintahan. Dapat dikatakan pengungkapan informasi non keuangan dipengaruhi oleh kompetisi politik yang dikarenakan setiap partai politik memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut Miriam Budiardjo (2004) pengertian partai politik adalah suatu kelompok yang teroganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai nilai dan cita cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstutisional untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan mereka.

Menurut Bardhan dan Yang (2004) dalam Nairobi (2014) kompetisi politik adalah kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan mengendalikan

pemerintahan dan mengalokasikan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan politik dan kepentingan masyarakat. Menurut Downs (1957) dalam Nairobi (2014), kompetisi politik diartikan sebagai kompetisi antara kandidat untuk mendapatkan suara terbanyak dari pemilih untuk menjalankan suatu platform kebijakan yang layak dijalankan.

6. Tingkat Pendidikan

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Menurut Notoatmodjo (2003) pendidikan memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru. Pengetahuan juga diperoleh melalui kenyataan (fakta) dengan melihat dan mendengar sendiri, serta melalui alat-alat komunikasi, misal membaca, mendengar radio dan televisi. Menurut Soekanto (2002) tingkat pendidikan seseorang akan membantu orang tersebut untuk lebih mudah menangkap dan memahami suatu informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka tingkat pemahaman juga meningkat serta tepat dalam pengambilan sikap.

Sedangkan menurut Soekanto (2002) tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan

berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang atau masyarakat dalam menerima hal baru.

7. Jumlah Penduduk

Menurut Said (1995) penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Proses kelahiran dan kematian tidak terjadi secara serentak di setiap daerah. Begitu juga dengan perpindahan. Proses proses demografi tersebut yang menyebabkan jumlah penduduk di setiap daerah berbeda. Jumlah penduduk yang berbeda memiliki permintaan informasi yang berbeda. Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu stakeholder terpenting Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar.

B. PENELITIAN RELEVAN

Dalam pengungkapan informasi kepada publik, kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada pengungkapan informasi finansial (*fiscal transparency*), misalnya yang telah dilakukan oleh Laswad et.al. (2005), Alt, et.al. (2006), dan Piotrowsky & Bertelli (2010). Dalam penelitian tersebut tingkat pengungkapan informasi keuangan diukur dalam bentuk pengungkapan secara menyeluruh informasi tentang anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal

ini hubungan antara masyarakat dan pemerintah digambarkan seperti hubungan principal dan agent dalam agency theory, dimana pengungkapan informasi keuangan oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya daerahnya.

Meskipun pengungkapan informasi keuangan adalah hal yang sangat penting, informasi lain tentang pengelolaan daerah juga tidak kalah pentingnya. Di Indonesia, Sulistiyo (2008) meneliti informasi apa saja yang telah disajikan Pemda dan menemukan banyak informasi yang diperlukan oleh stakeholder belum disajikan dalam website Pemda. Website Pemda di Indonesia (dengan sampel 90 website) sebagian besar hanya menyajikan informasi yang diwajibkan oleh Kemkominfo yakni: Selayang Pandang, Pemda, Geografi, Peta Wilayah dan Sumber Daya, Perda dan Buku Tamu. Informasi lainnya terkait data statistik belum diungkapkan.

Garcia-Sanchez dalam Martani (2013) meneliti tentang pengungkapan informasi terkait kegiatan sosial dan pengelolaan lingkungan daerah. Sampai saat ini, di Indonesia belum ada aturan jelas tentang apa saja yang harus diungkapkan oleh Pemerintah Daerah di website resmi-nya. Aturan resmi yang ada hanyalah ketentuan Kemkominfo tentang informasi minimal yang harus ada dan anjuran informasi yang sebaiknya disediakan dalam website Pemda yang tertuang dalam Blueprint e-government Pemerintah Indonesia. Informasi lain yang ingin diungkapkan oleh Pemda bersifat sukarela (voluntary disclosures) dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing. Dengan masih sedikitnya penelitian tentang pengungkapan informasi di website Pemda khususnya di

Sumatera Barat, penelitian ini akan mengisi research gap dalam hal pengungkapan informasi non-keuangan di website Pemda di Sumatera, khususnya informasi mengenai pelayanan publik terkait urusan wajib pemerintah daerah.

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Pengaruh Kompetisi Politik Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan Dalam Website Pemda

Dalam Nairobi (2014), kekuasaan politik menimbulkan kompetisi politik, kompetisi politik dapat membentuk kompetisi dilembaga legislative, *political turnover*, dan desentralisasi kewenangan politik. Kebijakan pengalokasian sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh negara atau pemerintahan tidak dapat diputuskan sendiri oleh pihak eksekutif. Mereka memerlukan kesepakatan dan pengesahan dari pihak legislatif. Dalam kondisi tertentu kesepakatan dan pengesahan suatu kebijakan harus ditentukan oleh pemungutan suara (*voting*) di lembaga legislatif. Jumlah kursi yang diperoleh suatu partai di lembaga legislatif akan sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan yang akan diputuskan dan disahkan.

Corry dalam Haryanto (1948) menyatakan bahwa partai politik merupakan suatu perkumpulan yang bermaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan menempatkan para anggotanya pada jabatan-jabatan pemerintahan. Dapat dikatakan pengungkapan informasi non keuangan dipengaruhi oleh kompetisi politik yang dikarenakan setiap partai politik memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut Miriam Budiardjo (2004) pengertian partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai nilai dan cita cita yang sama. Tujuan partai politik

adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan mereka.

Berdasarkan penelitian Laswad et.al., (2005) dijelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetisi politik dan *Internet Financial Reporting (IFR)*. Semakin tinggi level *political competition*, kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi keuangan secara sukarela juga akan semakin tinggi. Internet merupakan sarana paling mudah dan murah bagi pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangan sebagai bukti kinerja pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi dengan adanya bukti kinerja yang baik membuat pejabat daerah terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya.

Dalam penelitian ini, rasio kompetisi politik diukur dari jumlah anggota dewan partai politik pendukung kepala daerah dibagi dengan jumlah total anggota dewan. Hasil dari rasio kompetisi politik yang diperoleh digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh kompetisi politik terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan.

b. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan Dalam Website Pemda

Menurut Notoatmodjo (2003) pendidikan memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru. Pengetahuan juga diperoleh melalui kenyataan (fakta) dengan melihat dan mendengar sendiri, serta melalui alat-alat komunikasi, misal membaca,

mendengar radio dan televisi. Menurut Soekanto (2002) tingkat pendidikan seseorang akan membantu orang tersebut untuk lebih mudah menangkap dan memahami suatu informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka tingkat pemahaman juga meningkat serta tepat dalam pengambilan sikap.

Piotrowski dalam Martani (2013) kondisi sosial ekonomi suatu populasi memiliki hubungan positif dengan transparansi. Variabel terkait kondisi sosial ekonomi tersebut antara lain tingkat pendidikan, jumlah layanan jasa Pemda dan ketenagakerjaan. Dalam risetnya di Spanyol, Gandia (2007) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat transparansi keuangan pemerintah daerah. Seiring dengan Gandia, Tolbert et al. (2008) menemukan korelasi antara tingkat pendidikan masyarakat dengan permintaan terhadap informasi kepada pejabat publik. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur tingkat pendidikan dari rata-rata lama sekolah masyarakat dalam satu daerah. Hasil dari rata-rata lama sekolah masyarakat digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam website pemda.

c. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan Dalam Website Pemda

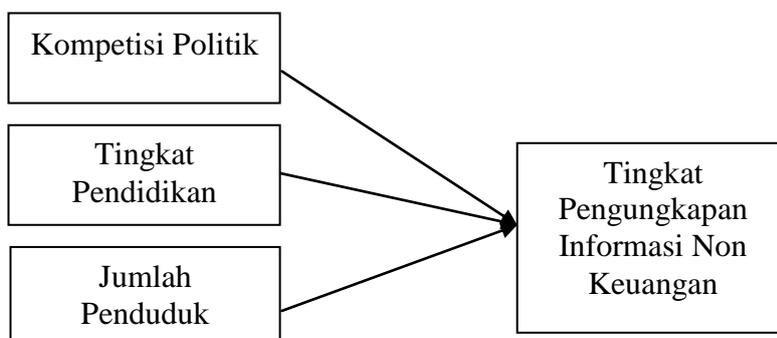
Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu stakeholder terpenting Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar. Riset pendahuluan tentang transparansi keuangan di pemerintah daerah di New Jersey telah mengungkapkan hubungan positif antara jumlah penduduk dengan

pengungkapan informasi keuangan (Piotrowski & Bertelli, 2010). Sementara itu dalam hubungannya dengan transparansi di bidang informasi sosial dan lingkungan di website pemerintah daerah di Spanyol, jumlah penduduk juga menunjukkan relasi yang sama (Garcia-Sanchez, 2013).

Menurut Said (1995) penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Proses kelahiran dan kematian tidak terjadi secara serentak di setiap daerah. Begitu juga dengan perpindahan. Proses proses demografi tersebut yang menyebabkan jumlah penduduk di setiap daerah berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam website pemda.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Berikut merupakan gambar dari kerangka konseptual Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda Kabupaten dan Kota di Sumatera:



E. HIPOTESIS

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

H1 : Kompetisi Politik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam Website Pemda

H2 : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam Website Pemda

H3 : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam Website Pemda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda” ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetisi Politik mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda . Artinya Semakin tinggi level kompetisi politik, kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi secara sukarela juga akan semakin tinggi. Internet merupakan sarana paling mudah dan murah bagi pemerintah daerah untuk melaporkan informasi non keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Tingkat Pendidikan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah masyarakat dalam suatu daerah yang menjadi proksi dari tingkat pendidikan. Maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam website pemerintah daerah.
3. Jumlah Penduduk (*Size*) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam website pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa masih sedikitnya pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan informasi non-keuangan. Pengungkapan informasi yang dianjurkan oleh Kemkominfo juga menunjukkan masih rendahnya motivasi pemerintah daerah untuk berusaha menyediakan informasi kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, menindaklanjuti hasil penelitian ini, perlu dibuat standarisasi pengungkapan informasi non-keuangan yang sama untuk setiap daerah di tingkat nasional, agar masyarakat dimanapun tempatnya mampu mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerahnya dengan baik.
2. Kedua, rendahnya pengungkapan informasi tentang program anti korupsi, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, program sosial dan lingkungan menunjukkan masih rendahnya keberpihakan pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi dan pemberdayaan masyarakat serta rendahnya kesadaran pemerintah daerah dalam hal-hal sosial dan lingkungan. Hal ini perlu menjadi perhatian penting Pemerintah Pusat agar memantau tata kelola pemerintah daerah demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, berpihak kepada masyarakat dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan di masa depan.

3. Bagi penelitian selanjutnya peneliti menyarankan periode pengamatan website yang lebih panjang dan bisa dilakukan lebih dari 2 kali di kesempatan yang berbeda untuk menghindari masalah aksesibilitas website.

Daftar Pustaka

- Alfaiz.Rizkika.D, 2013. Pengaruh Karakteristik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan melalui website.Skripsi Sarjana FE Universitas Diponegoro.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bodnar. George.H, William Hopwood S 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiarjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gracia-Sanchez, I.M., Frias-Aceitune, J.V. & Rodriguez-Dominguez, L. 2013. Determinants of Corporate Social.
- Haryanto. 1948. Partai Politik Suatu Tinjauan Umum. Yogyakarta: Liberty.
- Idris.2010. Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan Program SPSS Edisi Revisi III. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Jogiyanto. 2000. Sistem Informasi Berbasis Komputer. Edisi Kedua Yogyakarta: BPF.
- Jama'an. 2008. *Pengaruh Mekanisme Corporat Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Public di BEJ)*. Tesis Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kementrian Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2003. Blueprint Sistem Aplikasi Egovernment Bagi Lembaga Pemerintah Daerah.
- Kriyantono. Rachmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Laswad, F., Fisher, R. & Oyelere, P. 2005. Determinants of voluntary internet financial reporting by local financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24 (2), 101-121.
- Martani,D., Nastiti, D. & Wicaksono, P. 2013. Pengungkapan Informasi Non-keuangan tentang Pelayanan Publik melalui Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, Sesi II/11, September.
- Nairobi. 2014. Kompetisi Politik Lokal Di Indonesia: Studi Dalam Perspektif Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.